

RUMAH SAKIT Jiwa Daerah ATMA HUSADA MAHAKAM
POVINSI KALIMANTAN TIMUR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal

31 Desember 2022 dan 2023

I. Pendahuluan

Untuk mewujudkan manajemen rumah sakit yang baik diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan kepada masyarakat. Dengan akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil akhir atas kegiatan operasional rumah sakit harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Salah satu media untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan menyajikan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu serta dipublikasikan kepada masyarakat.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan bertujuan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan RSJD serta hasil-hasil yang dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana RSJD mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi RSJD berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan RSJD apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 Tahun 2015 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1818 Tahun 2015); dan
9. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 188.44/K.620/2013 Tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur Sebagai Badan Layanan Umum.

1.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), maka penyajian laporan keuangan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sesuai dengan peraturan tersebut.

Perkembangan PSAP Baru

1. PSAP nomor 15 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan efektif berlaku per 1 Januari 2022.
2. PSAP nomor 16 tentang Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi Efektif berlaku per 1 Januari 2023.
3. PSAP nomor 17 tentang Properti Investasi Efektif berlaku per 1 Januari 2023.

Sebagai entitas pelaporan, Laporan Keuangan RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur Berbasis AkruaI Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan

RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
POVINSI KALIMANTAN TIMUR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal
31 Desember 2022 dan 2023

7. Catatan atas Laporan Keuangan.

1.4 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur Berbasis Akrual Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3 Pendekatan penyusunan laporan keuangan
- 1.4 Sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan

Bab II. Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

- 2.1 Sejarah rumah sakit
- 2.2 Produk layanan
- 2.3 Tempat kedudukan
- 2.4 Visi, misi dan tujuan
- 2.5 Struktur organisasi
- 2.6 Kepegawaian

Bab III. Kebijakan Akuntansi

- 3.1 Entitas pelaporan
- 3.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 3.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 3.4 Penerapan kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan rekening-rekening akuntansi

Bab IV. Penjelasan Rekening-rekening Laporan Keuangan

- 4.1 Laporan Realisasi Anggaran
- 4.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 4.3 Neraca
- 4.4 Laporan Operasional
- 4.5 Laporan Arus Kas
- 4.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Bab V. Penutup

II. Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

2.1 Sejarah Rumah Sakit

Rumah Sakit Jiwa Pusat (RSJP) Samarinda didirikan pada tahun 1933 di atas tanah seluas 20.157 m² yang dibiayai oleh kesultanan Kutai dan merupakan Rumah Keperawatan Sakit Jiwa Pada tahun 2005. Luas rumah sakit bertambah dengan adanya bangunan baru gedung narkoba seluas 1.035,8 m².

Pada awalnya RSPJ didirikan bersama dengan Rumah Sakit Umum yang ditetapkan Ketua Bestwer College Samarinda. Tanggal 20 April 1949 Nomor 558/IH-9-Fed, masalah pembiayaan Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Jiwa Samarinda diserahkan oleh kesultanan Kutai dan Kerajaan di Kalimantan Timur.

Pada tanggal 1 Januari 1951, pembiayaan diambil alih oleh pemerintah pusat. Berdasarkan Surat Keputusan bulan November 1951, kantor Rumah Sakit Jiwa dipisahkan dari Rumah Sakit Umum.

Struktur organisasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 135/Menkes/SK/IV/1978, Rumah Sakit Jiwa ditetapkan sebagai Rumah Sakit Jiwa Kelas B.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi Daerah UPTD, Rumah Sakit Jiwa Pusat Samarinda dilimpahkan kepada pemerintah daerah sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1732/Menkes-Kesos/XII/2000 Tentang Pengalihan UPTD ke Pemerintah Kabupaten/kota dan Surat Revisi Departemen Kesehatan Nomor 196/Menkes-sos/III/2001, tanggal 7 Maret 2001 Tentang Revisi Penentuan UPTD kepada Pemerintah Provinsi, Pengoperasian Rumah Sakit Jiwa Samarinda dalam Tahun 2001 di Bawah Pemerintah Kota Samarinda.

Pada tahun 2005, untuk menghilangkan stigma di masyarakat, Rumah Sakit Jiwa Samarinda berubah nama menjadi Rumah Sakit Atma Husada Mahakam dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 03 tahun 2005, Tanggal 17 Januari Tahun 2005.

Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam bertujuan untuk memberi pelayanan kesehatan jiwa bagi seluruh masyarakat Kaltim yang tersebar di 4 kotamadya dan 10 kabupaten.

Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam bekerja sama dengan instansi terkait seperti Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman dan instansi pendidikan lainnya sebagai fasilitas prevensi, promosi, kuratif dan rehabilitasi serta riset di bidang kesehatan jiwa.

Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa intra mural dan ekstra mural serta melakukan pembinaan dan integrasi ke puskesmas dan Rumah Sakit Umum di Provinsi Kalimantan Timur dengan cara mengirim psikiater ke puskesmas dan Rumah Sakit Umum secara berkala.

RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
POVINSI KALIMANTAN TIMUR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal

31 Desember 2022 dan 2023

2.2 Produk Layanan

Jenis pelayanan kesehatan yang terdapat di RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur, terdiri atas:

1. Instalasi Gawat Darurat
2. Rawat Jalan
 - a. Klinik Psikiatri Dewasa
 - b. Klinik Psikiatri Lansia
 - c. Klinik Psikiatri Anak dan Remaja
 - d. Klinik Rehabilitasi Medik
 - e. Klinik Selaras (Rehabilitasi Psikososial)
 - f. Klinik Dokter Spesialis (penyakit dalam, klinik kesehatan anak, penyakit neurologi)
 - g. Klinik Psikologi
 - h. Klinik VCT
 - i. Klinik Kesehatan Gigi
3. Rawat Inap
 - a. Rawat Inap Jiwa
 - b. Rawat Inap Organik
 - c. Rawat Inap Geriatri
 - d. Observasi Forensik
 - e. UPIP (Unit Perawatan Intensif Psikiatri)
4. Instalasi Pemulihan Ketergantungan Napza
 - a. Klinik PTRM (Program Terapi Rumatan Metadon)
 - b. Klinik IPWL (Instansi Penerima Wajib Lapor)
 - c. Rawat Inap NAPZA
5. Instalasi Farmasi
6. Laboratorium
7. Klinik Alat Canggih
 - a. CT-Scan
 - b. RTMS (Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation)
 - c. PMS (Peripheral Magnetic Stimulation)
 - d. Neurofeedback Therapy
 - e. EEG (Electro encephalogram)

2.3 Tempat Kedudukan

Jl. Kakap No 23 Samarinda, telp. (0541) 743364, fax 741035, email: rsjdahm@gmail.com, Website: rsjdahm.kaltimprov.go.id

2.4 Visi, Misi, Tata Nilai dan Motto

Visi:

Sebagai Rumah Sakit yang mandiri dalam memberikan pelayanan kesehatan jiwa terpadu se-Kalimantan tahun 2023 .

Misi:

1. Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau, profesional, dan berorientasi pada pasien.
2. Mewujudkan Good & Clean Government di dalam Manajemen Rumah Sakit.

Tujuan:

1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA didukung pemanfaatan teknologi informasi modern.
2. Menciptakan pengelolaan manajemen rumah sakit yang berkualitas.

Sasaran

1. Optimalnya kualitas SDM rumah sakit;
2. Meningkatnya capaian mutu pelayanan rumah sakit; dan
3. Terlaksananya pengelolaan administrasi rumah sakit yang transparan dan akuntabel.

NPWP: 72.020.806.5-721.000

2.5 Pejabat Pengelola

Susunan Pejabat Pengelolas dan Dewan Pengawas sebagai berikut::

31-Dec-23

Pejabat Pengelola:

Direktur	: dr. Indah Puspitasari.MARS
Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan	: dr.Fauziah Andriyani, MARS
Wadir Penunjang dan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian	: Bero Utomo, S.Pd., S.Kep.
Wakil Direktur Umum dan Keuangan	: Ns.Rahmawati, S.Kep.,

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
POVINSI KALIMANTAN TIMUR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal
31 Desember 2022 dan 2023

Dewan Pengawas:

Ketua	: Masitah, S.K.M., MQIH
Anggota	: Taupik Rahman, S.Sos, MM Dr. Riries Choiru Pramulia
Sekretaris	: Yudia. M.Kes Ns. Hj. Rahmawati, S.Kep, MM

2.6 Kepegawaian

Terdiri atas:	31-Dec-23	31-Dec-22
ASN	33 orang	41 orang
Non PNS	129 orang	132 orang
PPPK	56 orang	0 orang
Jumlah Pegawai	218 orang	173 orang

III. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang dipakai dalam penyusunan Laporan Keuangan Puskesmas Perawatan xxxxx Berbasis Akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 yaitu PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

3.1 Entitas Pelaporan

1. RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur dalam menyajikan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran (APBD). Dalam hal ini RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur menyajikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
2. Laporan Keuangan ini sebagai entitas pelaporan dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda.

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan basis kas diterapkan untuk pengakuan komponen laporan keuangan yang disajikan dalam LRA, LPSAL dan LAK.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima dan beban diakui pada saat penurunan nilai aset atau kenaikan kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai ekuitas telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar dalam bentuk barang atau jasa disajikan dalam Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada posisi keuangan RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur tanpa memperhatikan saat kas dan setara kas diterima atau dibayar.

3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pendapatan diakui pada saat jasa atau pelayanan sudah diberikan. Beban diakui pada saat terjadinya transaksi atau beban yang sudah dikeluarkan untuk keperluan operasional, khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah:

1. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
2. Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kombinasi metode basis kas (cash basis) dengan metode basis akrual (accrual basis);
3. Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran, yaitu berdasarkan tahun takwim, yang diawali pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember;
4. Penetapan saldo pos-pos neraca awal diperoleh dari catatan administrasi dan/atau hasil inventarisasi fisik atas seluruh aset dan hasil inventarisasi fisik atas seluruh aset; dan
5. Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan.

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
POVINSI KALIMANTAN TIMUR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal

31 Desember 2022 dan 2023

3.4 Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening-rekening Akuntansi

3.4.1 Dasar Akuntansi

Laporan keuangan disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 217/PMK.05/2015 yaitu PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan yang disajikan dengan metode langsung. Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah.

3.4.2 Basis Pengukuran Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki RSJD sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh serta dapat diukur dalam satuan uang dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional kegiatan RSJD, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi RSJD.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, Investasi, aset tetap dan aset lainnya. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika aset tersebut:

1. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu 12 bulan ; atau
2. Dimiliki untuk perdagangan atau tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca ; atau
3. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi. Aset lancar antara lain meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, uang muka dan biaya dibayar di muka.

3.4.3 Kas dan Setara Kas

Pengertian

Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan RSJD. Kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*) dan rekening giro. Setara kas (*cash equivalent*) merupakan bagian dari aset lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 1 sampai 3 bulan tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan, tidak termasuk piutang dan persediaan.

Contoh setara kas antara lain: deposito berjangka kurang dari 3 bulan dan cek yang baru dapat diuangkan dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan.

Pengakuan

Pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

Pengukuran

Sebesar nilai nominal yang disajikan dalam nilai rupiah.

Penyajian

Disajikan di neraca atau laporan posisi keuangan dalam kelompok aset lancar.

Pengungkapan

- Rincian kas di bendahara, rekening giro dan deposito; dan
- Untuk deposito diungkapkan besarnya suku bunga, jangka waktu dan nama bank.

3.4.4 Piutang Layanan

Pengertian

Hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan operasional RSJD. Transaksi piutang usaha memiliki karakteristik sebagai berikut: D314:N323

1. Terdapat penyerahan barang, jasa, uang, atau timbulnya hak untuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait; dan
3. Jangka waktu pelunasan.

Pengakuan

Bertambah pada saat pasien pulang, berkurang pada saat diterima pembayaran atau koreksi kesalahan maupun penghapusan.

Pengukuran

Sebesar tarif dan disesuaikan dengan penurunan nilai (jika ada) berdasarkan umur piutang yang lebih dari 1 tahun.

Penyajian

Disajikan di neraca atau laporan posisi keuangan dalam kelompok aset lancar.

Pengungkapan

Dirinci per nama pasien dan penanggung pembayaran.

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
POVINSI KALIMANTAN TIMUR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal

31 Desember 2022 dan 2023

3.4.5 Piutang Lain-lain

Hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan operasional RSJD. Transaksi piutang usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Terdapat penyerahan barang/jasa atau uang di luar kegiatan operasional.
2. Persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait.
3. Jangka waktu pelunasan

3.4.6 Cadangan Kerugian Piutang

Besarnya penyisihan piutang pada tiap akhir tahun ditentukan berdasarkan umur piutang (UP) sebagai berikut:

- | | |
|------------------|------|
| 1. UP 0-1 bulan | 0,5% |
| 2. UP 1-3 bulan | 10% |
| 3. UP 3-12 bulan | 50% |
| 4. UP > 1 tahun | 100% |

Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tidak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih outstanding.

3.4.7 Persediaan

Pengertian

Merupakan aset berupa barang habis pakai medis dan non medis yang disediakan untuk pelayanan kesehatan, pemeliharaan aset dan keperluan administrasi.

Pengakuan

Persediaan diakui bertambah pada saat diterima dan berkurang pada saat pemakaian atau penyerahan. Metode pencatatan saldo persediaan yang digunakan adalah harga terakhir karena perputaran persediaan tergolong cepat.

Pengukuran

Sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi mana yang lebih rendah. Nilai realisasi adalah nilai wajar dikurang beban untuk menjual persediaan. Persediaan yang kadaluarsa dikeluarkan dari saldo persediaan.

Penyajian

Sisa persediaan disajikan di neraca, sedangkan persediaan yang terpakai atau digunakan disajikan sebagai beban persediaan dalam laporan operasional.

Pengungkapan

- Dirinci per jenis persediaan; dan
- Dikeluarkan dari persediaan jika terdapat persediaan yang kadaluarsa dalam periode laporan.

3.4.8 Uang Muka

Uang Muka menurut tujuan penggunaannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu uang muka kegiatan, uang muka pembelian barang/jasa. Uang muka kegiatan adalah pembayaran di muka untuk suatu kegiatan mendesak RSJD yang belum diketahui secara pasti jumlah biaya/pengeluaran sebenarnya dan harus dipertanggung jawabkan setelah kegiatan tersebut selesai.

Uang muka pembelian barang/jasa adalah pembayaran uang muka kepada pemasok/rekanan atas pembelian barang dan jasa yang saat pembayaran tersebut barang dan jasa belum diterima. Pembayaran di muka tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian pembayaran dari barang dan jasa yang diberikan pada saat penyelesaian. Uang muka berfungsi untuk membiayai kelancaran operasional RSJD.

3.4.9 Belanja Dibayar di Muka

Belanja dibayar di muka adalah pembayaran di muka yang manfaatnya akan diperoleh pada masa yang akan datang. Belanja dibayar di muka berfungsi untuk membiayai operasional jangka panjang bagi kepentingan beban RSJD.

Aset non lancar adalah aset yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan beban RSJD dan tidak memenuhi kriteria aset lancar. Aset non lancar antara lain meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya.

Aset non lancar adalah aset yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan beban RSJD dan tidak memenuhi kriteria aset lancar. Aset non lancar antara lain meliputi investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya.

3.4.10 Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
POVINSI KALIMANTAN TIMUR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal

31 Desember 2022 dan 2023

3.4.11 Aset Tetap

Pengertian

Merupakan aset yang dimiliki untuk dipergunakan dalam kegiatan operasional, dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Biaya perolehan (cost) aset tetap dapat diukur secara andal;
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal RSJD; dan
4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan RSJD.

Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat siap digunakan untuk kegiatan operasional sesuai dengan posisi dan kondisi yang direncanakan. Jika aset tetap tidak memberikan manfaat lagi untuk kegiatan operasional, maka harus dieliminasi dari aset tetap.

Pengakuan awal aset tetap dalam neraca awal RSJD menggunakan dasar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan; atau nilai wajar.

Pengukuran

Seluruh biaya yang direalisasi untuk pengadaan aset tetap sejak perencanaan sampai pada posisi dan kondisi aset tetap dapat digunakan, maka biaya tersebut dikapitalisasi sebagai biaya perolehan. Namun jika biaya perolehan tersebut berbeda signifikan dengan nilai wajar untuk memperoleh aset yang bersangkutan, maka perbedaan signifikan tersebut diakui sebagai kerugian dan dilaporkan dalam laporan operasional.

Secara periodik, nilai tercatat aset tetap harus dilakukan *review* dan dilakukan penyesuaian jika terdapat perbedaan signifikan dengan nilai wajarnya. Jika nilai tercatat lebih besar dari nilai wajar, maka harus diakui adanya kerugian penurunan nilai dan dilaporkan dalam laporan operasional. Sedangkan jika nilai tercatat lebih rendah dari nilai wajar, maka dilakukan penyesuaian dengan menyesuaikan akumulasi penyusutan.

<u>Jenis Aset Tetap</u>	<u>Masa Manfaat</u>	<u>Tarif Penyusutan</u>
Bangunan dan gedung	20 tahun	5%
Jaringan dan instalasi	10 tahun	10%
Peralatan dan mesin	5 tahun	20%
Aset tetap lainnya	5 tahun	20%

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Penyusutan atas perolehan aset baru dihitung setahun penuh pada tahun yang bersangkutan. Belanja modal yang dilaporkan pada laporan realisasi anggaran dilakukan penyesuaian sebagai aset tetap jika memenuhi kriteria kapitalisasi aset, yaitu dimiliki untuk digunakan operasional, memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dan nilainya minimal Rp 1.000.000,-

Apabila tahun perolehan tidak diketahui, maka tarif dasar penyusutan menggunakan taksiran sisa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Secara periodik paling lambat setiap akhir tahun dilakukan review atas nilai buku. Apabila terdapat perbedaan material bahwa nilai buku lebih tinggi dari nilai wajar, maka aset tetap dinilai sebesar nilai wajar tersebut. Selisih rugi dibukukan sebagai kerugian penurunan nilai pada laporan operasional periode yang bersangkutan.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset-aset tersebut. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya yang membawa aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksud.

Penyajian

Disajikan di neraca dalam kelompok aset tidak lancar.

Pengungkapan

- Aset tetap dirinci per golongan dan jenis
- Metode penyusutan;
- Rekonsiliasi saldo awal ke saldo akhir;
- Penyesuaian nilai tercatat; dan
- Penghapusan.

3.4.12 Aset Lainnya

Pengertian

Merupakan aset yang tidak dapat digolongkan dalam golongan aset tersebut di atas, yaitu:

- Beban ditangguhkan atau pengeluaran yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun;
- Aset dalam pembangunan; dan
- Aset tetap yang tidak digunakan lagi.

RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
POVINSI KALIMANTAN TIMUR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal
31 Desember 2022 dan 2023

Pengakuan

- Beban ditangguhkan diakui pada saat pengeluaran;
- Aset dalam pembangunan diakui sesuai kemajuan prestasi pekerjaan; dan
- Aset tetap yang tidak digunakan lagi diakui pada saat aset tetap tersebut dinyatakan tidak digunakan sesuai berita acara.

Pengukuran

- Beban ditangguhkan sebesar beban perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi.
Masa amortisasi ditetapkan:
Aplikasi komputer : 4 th.
Beban ditangguhkan lainnya : sesuai dengan kondisi.
Apabila diketahui periodisasi manfaat pengeluaran untuk beban ditangguhkan (misalnya: akreditasi setiap tiga tahun sekali) maka amortisasi sesuai dengan periodisasi masa tersebut.
- Aset dalam pembangunan sebesar nilai prestasi pekerjaan sesuai berita acara.
- Aset tetap yang tidak digunakan sebesar nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan.

Penyajian

Disajikan di neraca dalam kelompok aset tidak lancar.

Pengungkapan

- Dirinci per golongan dan jenis; dan
- Metode dan masa amortisasi.

3.4.13 Basis Pengukuran Kewajiban

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi RSJD. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konskuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kewajiban jangka pendek dan jangka panjang diukur sebesar nilai nominal. Nilai nominal adalah nilai kewajiban RSJD pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.

Kewajiban jangka pendek dan jangka panjang berkurang pada saat pembayaran/ penyelesaian oleh RSJD.

3.4.18 Utang Usaha

Pengertian

Merupakan jumlah yang harus dibayar pada masa yang akan datang yang terjadi atas peristiwa masa lalu dan dapat diukur dengan andal.

Pengakuan

Pada saat terjadi transaksi sebesar nilai barang atau jasa termasuk di dalamnya PPN dan PPh sesuai faktur atau bukti pembayaran yang sah dan berkurang pada saat pembayaran.

Pengukuran

Sebesar harga faktur atau dengan taksiran nilai wajar jika nilainya belum diketahui.

Penyajian

- Disajikan di neraca dalam kelompok kewajiban jangka pendek, jika jatuh temponya paling lama 1 (satu) tahun.
- Disajikan sebagai kewajiban jangka panjang, jika jatuh temponya lebih dari 1 (satu) tahun.

Pengungkapan

- Dirinci per jenis kewajiban dan krediturnya; dan
- Persyaratan pinjaman, suku bunga (jika ada), jangka waktu dan tanggal jatuh temponya.

3.4.19 Belanja Yang Masih Harus Dibayar

Pengertian

Merupakan beban jasa yang telah diterima/dinikmati yang sampai dengan tanggal neraca belum dibayar, terjadi atas peristiwa masa lalu dan dapat diukur dengan andal.

Pengakuan

Pada saat terjadi transaksi dan berkurang pada saat pembayaran.

Pengukuran

Sebesar harga faktur, tarif atau dengan taksiran nilai wajar jika nilainya belum diketahui.

Penyajian

Disajikan di neraca dalam kelompok kewajiban jangka pendek.

Pengungkapan

Dirinci per jenis jasa yang harus dibayar.

RUMAH SAKIT Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
Provinsi Kalimantan Timur

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal

31 Desember 2022 dan 2023

3.4.20 Ekuitas

Pengertian

Merupakan hak residual Pemda pemilik RSJD atas aset setelah dikurangi seluruh kewajiban.

Pengakuan

- Pada saat awal BLUD dari hasil inventarisasi neraca awal;
- Pada saat terjadi surplus/defisit berdasarkan laporan operasional; dan
- Pada saat terjadi koreksi saldo awal karena kesalahan.

Pengukuran

- Harga perolehan atau nilai wajar; dan
- Selisih antara aset dan kewajiban, khusus untuk neraca awal.

Penyajian

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Saldo ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh surplus/defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

3.4.21 Pendapatan Jasa Layanan

Pengertian

1. Pendapatan LRA

Pendapatan RSJD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Negara/ Daerah merupakan pendapatan Negara/Daerah.

RSJD diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/ jasa. Salah satu bentuk fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan adalah bahwa pendapatan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja.

Pendapatan yang dikelola langsung untuk membiayai belanja tersebut berarti bahwa pendapatan RSJD tidak disetorkan terlebih dahulu ke Kas negara/ Daerah.

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan pembukaan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Khusus untuk pendapatan Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

Pendapatan-LRA pada RSJD diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Pendapatan-LRA pada RSJD merupakan pendapatan bukan pajak.

Termasuk pendapatan bukan pajak pada RSJD:

- a. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
- b. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- c. Pendapatan hasil kerja sama;
- d. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
- e. Pendapatan RSJD lainnya.

Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan sebagaimana dimaksudkan adalah imbalan yang diperoleh jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahi.

Pendapatan hasil kerja sama sebagaimana adalah perolehan dari kerja sama operasional, sewa-menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi RSJD.

Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas sebagaimana adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban RSJD untuk menyerahkan barang/jasa.

Pendapatan lainnya sebagaimana dimaksud, antara lain berupa:

- a. Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
- b. Jasa giro;
- c. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah mata uang asing dan/atau
- d. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh RSJD.

Belanja RSJD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi untuk RSJD, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada RSJD selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus/defisit LRA.

RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
POVINSI KALIMANTAN TIMUR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal

31 Desember 2022 dan 2023

Transaksi pembayaran dapat terjadi pada RSJD yang melakukan transaksi perolehan pinjaman dan/atau investasi jangka panjang. Penerimaan pembiayaan pada BLU terjadi saat pinjaman jangka panjang diterima dan/ atau divestasi investasi jangka panjang dilaksanakan. Sementara, pengeluaran pembiayaan pada BLU terjadi pada saat pelunasan pinjaman jangka panjang dan/ atau pengeluaran investasi jangka panjang.

Penerimaan pembiayaan pada RSJD diakui pada saat kas yang diterima RSJD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Pengeluaran pembiayaan pada RSJD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan RSJD diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Selisih lebih/ kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pembiayaan neto.

Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

Penerimaan RSJD

- a. RSJD merupakan satuan kerja perangkat daerah yang memiliki karakter khusus karena berperan untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dengan mendapatkan dana dukungan dari APBD
- b. Setiap penerimaan yang diperoleh dari masyarakat sebagai akibat pemberian pelayanan medis merupakan pendapatan dari RSJD. Selanjutnya, semua pendapatan RSJD otomatis menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus diadministrasikan kedalam APBD.
- c. RSJD mengakui retribusi usaha pelayanan kesehatan pada saat mengajukan pembayaran klaim kepihak ketiga (BPJS), bukan pada saat RSJD memberikan pelayanan kepada pasien.

Penerimaan RSJD dari JPKMM/BPJS

Pembayaran biaya perawatan medis dari pasien masyarakat miskin yang dibayari oleh pemerintah.

Penggunaan Langsung atas Penerimaan RSJD

Pada prinsipnya penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan RSJD harus dilakukan melalui Kas Daerah. Namun demikian, jika penerimaan RSJD digunakan langsung untuk keperluan operasional RSJD, maka terlebih dahulu harus berstatus BLUD.

Status organisasi RSJD berstatus BLUD, maka penerimaan dan pengeluarannya dilakukan oleh RSJD yang bersangkutan. Pada akhir periode akuntansi akan dilaporkan oleh RSJD untuk dikondisikan ke dalam LKPD.

2. Pendapatan LO

Merupakan kenaikan aset atau penurunan kewajiban yang timbul atas penyerahan barang dan jasa kepada pasien atau pihak yang menanggung dan hak kapitasi dalam satu periode.

Pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:

- a. Pendapatan dari alokasi APBN/APBD;
- b. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
- c. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- d. Pendapatan hasil kerjasama;
- e. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa; dan
- f. Pendapatan RSJD lainnya.

Pendapatan Dari Layanan Yang Bersumber Dari Masyarakat

Merupakan pendapatan utama (pokok) yang diperoleh sebagai imbalan atas barang atau jasa layanan kesehatan yang diserahkan kepada masyarakat. Pendapatan usaha dari jasa layanan kesehatan selanjutnya dapat dirinci per jenis layanan kesehatan yang diberikan RSJD terdiri dari:

- a. Pendapatan rawat inap;
- b. Pendapatan rawat jalan;
- c. Pendapatan instalasi gawat darurat (IGD);
- d. Pendapatan Radiologi;
- e. Pendapatan farmasi/apotik; dan
- f. Pendapatan lain-lain.

Namun demikian, dalam hal terdapat kesulitan dalam mengklasifikasi pendapatan per jenis layanan, klasifikasi lain dapat dilakukan misalnya berdasarkan segmen penerimaannya (sumbernya), misalnya:

- a. Pendapatan BPJS
- b. Pendapatan Pasien Umum
- c. Pendapatan Jamkesda/Jampersal
- d. Pendapatan Jaminan lainnya
- e. Pendapatan kerjasama instansi/ perusahaan
- f. Pendapatan lainnya

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
POVINSI KALIMANTAN TIMUR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal

31 Desember 2022 dan 2023

Pendapatan diakui berdasarkan accrual basis, yaitu mengakui transaksi pendapatan saat transaksi atau peristiwa pendapatan itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima di kas RSJD. Pendapatan diakui sebagai berikut:

Pengakuan

1. Pendapatan LRA

Pada saat kas dan setara kas diterima RSJD.

2. Pendapatan LO

- Pada saat selesai pelayanan pasien yaitu saat pasien pulang; dan
- Untuk sistem kapitasi yang tidak harus dipertanggungjawabkan jumlah dan beban pasien yang telah dilayani, pendapatan diakui pada saat uang diterima.

Pada saat diterima atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang dan/ atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat;

Pengukuran

- Sesuai dengan tarif yang berlaku untuk pasien yang bersangkutan; dan
- Sedangkan untuk sistem kapitasi, sesuai dengan uang yang diterima.

Pendapatan dari jasa layanan kesehatan dan pendapatan usaha lainnya dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima dari suatu jasa yang di berikan, sedangkan nilai piutang pelayanan disajikan sebesar jumlah bersih, yaitu jumlah seluruhnya tagihan piutang dikurang dengan penyisihan piutang.

Pendapatan yang berasal dari BPJS dinilai pada saat nilai pendapatan yang akan diterima tersebut dapat ditaksir secara andal dengan tarif yang dapat ditentukan secara andal.

Penyajian

1. Pendapatan LRA

Disajikan di laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas.

2. Pendapatan LO

Disajikan di laporan operasional.

Pendapatan disajikan secara terpisah pada laporan operasional untuk setiap jenis pendapatan.

Rincian jenis pendapatan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan (CaLk).

Pengungkapan

Dirinci per nama dan pihak yang menanggung pembayaran.

3.4.22 Pendapatan Hibah

Pengertian

Merupakan hibah dalam bentuk tunai maupun natura dari pihak ketiga.

Pendapatan merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain, tanpa adanya kewajiban bagi RSJD untuk menyerahkan barang/jasa. Hibah diklasifikasikan menjadi Hibah Tidak Terikat. Hibah Terikat adalah hibah yang peruntukannya ditentukan oleh pemberi hibah, sedangkan hibah tidak terikat adalah hibah yang peruntukannya tidak ditentukan oleh pemberi hibah. Pendapatan yang dapat diakui dalam hibah ini adalah untuk hibah yang tidak terikat.

Pengakuan

1. Pendapatan LO

Pada saat uang atau barang diterima.

Pada saat hak kepemilikan barang berpindah. Hibah yang diakui sebagai pendapatan ini adalah untuk hibah yang tidak terikat. Sementara hibah berupa uang diakui pada saat kas diterima RSJD;

2. Pendapatan LRA

Pada saat kas dan setara kas diterima.

Pengukuran

Tunai sesuai nilai nominal. Natura sebesar harga perolehan sesuai faktur atau nilai wajar barang yang diterima.

Pendapatan hibah berupa barang dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan; pendapatan hibah berupa uang dicatat sebesar jumlah kas yang diterima oleh RSJD

Penyajian

1. Pendapatan LO

Disajikan di laporan operasional.

2. Pendapatan LRA

Disajikan di laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas.

Pengungkapan

Dirinci sesuai sumber hibah.

RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
POVINSI KALIMANTAN TIMUR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal

31 Desember 2022 dan 2023

3.4.23 Pendapatan Hasil Kerjasama

Pengertian

Merupakan pendapatan yang diperoleh dari pihak ketiga atas kerjasama dengan RSJD.

Pendapatan yang diperoleh dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi RSJD.

Pengakuan

Pada saat uang, barang atau jasa diterima, karena tidak terdapat perbedaan material antara basis akrual dan basis kas.

Pengukuran

Sebesar nilai nominal sesuai perjanjian kerjasama.

Penyajian

Disajikan di laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas.

Pengungkapan

Dirinci per nama kerjasama dan pihak ketiga.

3.4.24 Pendapatan APBD

Pengertian

- Penerimaan berupa dana untuk keperluan belanja operasional (pegawai, barang dan jasa dan Promkes) dan belanja modal.
- Penerimaan berupa barang (obat, barang habis pakai, aset tetap dan aset lainnya).

Merupakan pendapatan yang berasal dari alokasi dana APBD, baik untuk belanja operasional maupun belanja modal. Belanja operasional merupakan belanja pegawai dan belanja barang/jasa. Pendapatan RSJD yang bersumber dari APBD berupa pendapatan yang berasal dari otoritas kredit anggaran pemerintah daerah, bukan dari kegiatan pembebanan APBD. Pendapatan yang berasal dari alokasi APBN, baik untuk belanja operasional maupun belanja modal. Belanja operasional merupakan belanja pegawai dan belanja barang/jasa. Belanja modal yang bersumber dari APBN dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/ atau tugas pembantuan, dan lain-lain.

Pengakuan

Pada saat pencairan SP2D.

Pada saat pengeluaran belanja yang dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya SP2D;

Pengukuran

Sebesar nilai nominal.

Pendapatan dari APBD dicatat sebesar nilai pengeluaran bruto belanja pada SPM

Penyajian

Disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan operasional dan laporan arus kas.

Pengungkapan

Dirinci per jenis belanja dan per nomor SP2D.

3.4.25 Pendapatan Usaha Lainnya

Pendapatan yang berasal dari hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi RSJD. Lain-lain pendapatan RSJD yang sah antara lain terdiri dari:

1. Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
2. Hasil pemanfaatan kekayaan;
3. Jasa giro;
4. Pendapatan bunga;
5. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
6. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh RSJD;
7. Hasil investasi;
8. Hasil kerja sama.

3.4.26 Beban dan Belanja

Pengertian

1. Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi selama 1 (satu) periode akuntansi dalam bentuk arus keluar kas atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas bersih.

Merupakan penurunan aset atau kenaikan kewajiban yang timbul baik atas aktivitas operasional maupun non operasional.

2. Belanja

Merupakan semua pengeluaran kas dan setara kas dari Bendahara Pengeluaran RSJD yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode anggaran yang bersangkutan, kecuali transaksi pembiayaan.

RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
POVINSI KALIMANTAN TIMUR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal
31 Desember 2022 dan 2023

Pengakuan

1. Beban

Pada saat penurunan aset dan/atau timbulnya kewajiban atas transaksi operasional.

Beban (*expense*) pada umumnya diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban dan dapat diukur dengan andal. Untuk beban yang belum diketahui jumlahnya secara pasti sampai penutupan buku, maka pengakuannya didasarkan atas transaksi yang dilakukan oleh fungsi teknis. Surplus/ defisit yang timbul sebagai akibat perbedaan antara transaksi dengan jumlah sebenarnya dibukukan sebagai beban tahun berjalan, yaitu pada saat diketahui timbulnya perbedaan tersebut.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari RSJD.

Terjadinya konsumsi aset adalah pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu.

2. Belanja

Pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran RSJD.

Pengukuran

1. Beban

Sebesar harga perolehan.

Jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan

Jumlah beban yang telah terjadi atau merupakan beban periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang.

Alokasi sistematis untuk periode berjalan atas beban yang telah dikeluarkan.

2. Belanja

Sebesar kas dan setara kas yang dikeluarkan.

Penyajian

1. Beban

Disajikan di laporan operasional dengan golongan beban operasional dan beban non operasional.

Beban RSUD Beriman diklasifikasikan sebagai berikut:

- Beban Pegawai
- Beban Persediaan
- Beban Jasa
- Beban Pemeliharaan
- Beban Langganan Daya dan Jasa
- Beban Perjalanan Dinas
- Beban Penyisihan, Penyusutan dan Amortisasi
- Beban Bunga

2. Belanja

Disajikan di laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas.

Pengungkapan

Beban operasional dirinci sesuai dengan fungsi beban.

3.4.27 Kerugian

Pengertian

Merupakan penurunan aset atau kenaikan kewajiban yang timbul dari peristiwa luar biasa.

Pengakuan

Pada saat terjadinya penurunan aset atau kenaikan kewajiban.

Pengukuran

Sebesar kerugian nilai aset atau kewajiban yang akan dibayar.

Penyajian

Disajikan di laporan operasional dalam kelompok beban non operasional.

Pengungkapan

- Dirinci per jenis kerugian.
- Dijelaskan sebab-sebab terjadinya kerugian.

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
POVINSI KALIMANTAN TIMUR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal
31 Desember 2022 dan 2023

3.4.28 Setor ke Kas Daerah

Pengertian

Merupakan pengeluaran kas yang disetorkan ke Kas Daerah.

Pengakuan

Pada saat terjadinya pengeluaran kas.

Pengukuran

Sebesar nilai nominal.

Penyajian

Disajikan di laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.

Pengungkapan

Dasar yang digunakan untuk penyetoran ke Kas Daerah antara lain surat kepala daerah dan analisis likuiditas.

IV. Penjelasan Rekening-rekening Laporan Keuangan

4.1 Laporan Realisasi Anggaran

4.1.1 Pendapatan

Terdiri atas:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan			
Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	19.500.000.000,00	-	
Pendapatan jaminan			
Pasien BPJS		21.687.506.356,00	
Pasien IPWL		478.157,00	
Dinas Kesehatan		410.629.764,14	
Dinas Sosial		136.204.824,00	
Jumlah		22.234.819.101,14	
Pendapatan non jaminan			
Pasien umum rawat inap		379.547.494,00	
Pasien umum rawat jalan		3.149.776.337,00	
Pasien PKL Wing's		779.953.802,00	
Jumlah		4.309.277.633,00	
Pendapatan APBD			
Subsidi belanja pegawai	37.843.850.247,00	34.198.257.791,00	90,37
Subsidi belanja barang dan jasa	18.389.967.173,00	17.015.635.059,00	92,53
Subsidi belanja modal	13.810.128.922,00	13.172.341.179,00	95,38
Jumlah		64.386.234.029,00	
Pendapatan usaha lainnya			
Kelebihan pembayaran BPJ		89.528,00	
Studi banding		1.500.000,00	
Pendidikan dan pelatihan		194.830.000,00	
Sewa ATM		35.000.000,00	
Guest house		22.600.000,00	
Sewa ruko/kantin		34.400.000,00	
Penitipan anak		28.300.000,00	
Sewa koperasi		1.350.000,00	
Sewa parkir		721.450,00	
Air ruko/kantin		2.300.000,00	
Laundry		19.140.000,00	
Ambulan		500.000,00	
Fee Hantaru		300.000,00	
Lain-lain		341.000.010,00	
Bunga jasa giro		39.384.066,06	
Jumlah pendapatan usaha lainnya		721.415.054,06	
Jumlah pendapatan	89.543.946.342,00	91.651.745.817,20	102,35

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
POVINSI KALIMANTAN TIMUR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal
31 Desember 2022 dan 2023

4.1.2 Belanja

Terdiri atas:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja			
Belanja operasi			
Belanja pegawai	52.906.429.754,00	48.264.355.710,00	91,23
Belanja barang dan jasa	29.802.858.710,00	28.405.179.595,35	95,31
Jumlah	82.709.288.464,00	76.669.535.305,35	92,70
Belanja modal			
Belanja peralatan dan mesin	12.382.023.365,00	12.010.593.519,00	97,00
Belanja gedung dan bangunan	2.128.384.885,00	1.799.974.700,00	84,57
Jumlah	14.510.408.250,00	13.810.568.219,00	95,18
Jumlah belanja	97.219.696.714,00	90.480.103.524,35	93,07

4.1.3 Pembiayaan

Terdiri atas:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Penerimaan pembiayaan			
Penggunaan SILPA tahun lalu		7.675.750.371,60	
Jumlah	-	7.675.750.371,60	
Pengeluaran pembiayaan			
Jumlah pembiayaan	-	7.675.750.371,60	

4.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Terdiri atas:

	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Saldo anggaran lebih awal	7.675.750.371,60	26.769.774.377,61	(19.094.024.006,01)	(71,33)
Penggunaan SAL	(7.675.750.371,60)	(26.769.774.377,61)	19.094.024.006,01	
Sub total (1)	-	-	-	
SILPA/SikPA sesuai LRA	8.847.392.664,45	7.675.750.371,60	1.171.642.292,85	15,26
Sub total (2)	8.847.392.664,45	7.675.750.371,60	1.171.642.292,85	15,26
Saldo Anggaran Lebih Akhir	8.847.392.664,45	7.675.750.371,60	1.171.642.292,85	15,26

4.3 Neraca

4.3.1 Kas dan setara kas

Terdiri atas:

	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Bank Kaltimara no rek 012101002212306	8.847.392.664,45	7.675.750.371,60	1.171.642.292,85	15,26

4.3.2 Piutang Layanan

Terdiri atas:

	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Pasien BPJS Rawat Inap	1.094.361.700,00	-	1.094.361.700,00	
Pasien BPJS Rawat Jalan	518.039.700,00	-	518.039.700,00	
Piutang Obat BPJS	114.674.676,00	-	114.674.676,00	
Pasien Dinas Kesehatan Samarinda	282.380.445,80	334.123.841,00	(51.743.395,20)	(15,49)
Pasien Dinas Kesehatan Maha	194.688.573,00	194.688.573,00	-	
Pasien Umum	638.193.281,00	627.382.480,00	10.810.801,00	1,72
Jumlah	2.842.338.375,80	1.156.194.894,00	1.686.143.481,80	145,84

RUMAH SAKIT Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
Provinsi Kalimantan Timur

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal
31 Desember 2022 dan 2023

4.3.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Terdiri atas:

	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Penyisihan piutang tidak tertagih	(772.543.924,25)	(683.447.834,00)	(89.096.090,25)	13,04

4.3.4 Persediaan

Terdiri atas:

	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Persediaan layanan:				
Obat-obatan	219.941.349,30	581.886.387,00	(361.945.037,70)	(62,20)
Peralatan kesehatan	-	42.936.800,00	(42.936.800,00)	(100,00)
Bahan kimia	64.868.728,00	70.573.535,00	(5.704.807,00)	(8,08)
Makan/sembako	18.104.200,00	9.451.600,00	8.652.600,00	91,55
Jumlah persediaan layanan	302.914.277,30	704.848.322,00	(401.934.044,70)	(57,02)
Persediaan non layanan:				
Alat tulis kantor	79.295.330,00	27.035.465,00	52.259.865,00	193,30
Bahan Komputer	2.300.000,00	2.620.000,00	(320.000,00)	(12,21)
Kertas, cover dan cetakan	64.012.095,00	302.940,00	63.709.155,00	21.030,29
Alat listrik dan elektronik	6.030.676,00	9.453.000,00	(3.422.324,00)	(36,20)
Perangko, materai, benda pos	920.000,00	200.000,00	720.000,00	360,00
Bahan bakar minyak dan pelumas	32.100.000,00	18.349.000,00	13.751.000,00	74,94
Bahan baku	-	111.112.680,00	(111.112.680,00)	(100,00)
Perabot kantor	328.269.984,00	404.820.991,00	(76.551.007,00)	(18,91)
Bahan bangunan	570.000,00	-	570.000,00	
Suku cadang	58.362.750,00	-	58.362.750,00	
Perlengkapan dinas	815.850,00	-	815.850,00	
Souvenir	24.400.000,00	-	24.400.000,00	
Bahan untuk kegiatan lainnya	22.262.125,00	-	22.262.125,00	
Lain-lain	30.704.031,00	44.361.007,00	(13.656.976,00)	(30,79)
Jumlah persediaan non layanan	650.042.841,00	618.255.083,00	31.787.758,00	5,14
Jumlah	952.957.118,30	1.323.103.405,00	(370.146.286,70)	(27,98)

Rincian pada lampiran 2 dan 3

4.3.5 Aset Tetap

Terdiri atas:

	Saldo	Mutasi		Saldo
	31-Dec-22	Tambah	Kurang	31-Dec-23
Biaya perolehan:				
Tanah	17.571.580.100,00	-	-	17.571.580.100,00
Peralatan dan mesin	79.460.080.507,00	11.978.972.519,00	484.183.980,00	90.954.869.046,00
Gedung dan bangunan	46.117.838.087,00	-	535.680.000,00	45.202.008.587,00
Jalan, irigasi, dan jaringan	3.246.878.725,00	-	-	3.246.878.725,00
Aset tetap lainnya	16.653.200,00	-	-	16.653.200,00
Kontruksi dalam pengerjaan	-	1.320.256.200,00	-	1.320.256.200,00
Jumlah biaya perolehan	146.413.030.619,00	13.299.228.719,00	1.019.863.980,00	158.312.245.858
Akumulasi penyusutan:				
Peralatan dan mesin	35.622.967.187,00	13.039.383.177,60	650.529.605,00	48.011.820.760
Gedung dan bangunan	9.435.499.889,00	938.648.333,00	11.606.400,00	10.362.541.822
Jalan, irigasi, dan jaringan	730.104.972,00	137.712.443,00	-	867.817.415
Aset tetap lainnya	-	-	-	-
Jumlah akumulasi penyusutan	45.788.572.048,00	14.115.743.953,60	662.136.005,00	59.242.179.997
Jumlah nilai buku	100.624.458.571,00			99.070.065.861

Rincian pada lampiran 4

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
POVINSI KALIMANTAN TIMUR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal
31 Desember 2022 dan 2023

4.3.6 Aset Lainnya

Terdiri atas:

	Saldo	Mutasi		Saldo
	31-Dec-22	Tambah	Kurang	31-Dec-23
Biaya perolehan:				
Aset tak berwujud	389.195.000,00	-	-	389.195.000,00
Aset lain-lain	59.950.000,00	-	59.950.000,00	
<i>Jumlah biaya perolehan</i>	449.145.000,00	-	59.950.000,00	389.195.000,00
Akumulasi amortisasi	290.810.416,66	23.145.000,00	-	313.955.416,66
<i>Jumlah nilai buku</i>	158.334.583,34			75.239.583,34

4.3.7 Properti Investasi

Terdiri atas:

	Saldo	Mutasi		Saldo
	31-Dec-22	Tambah	Kurang	31-Dec-23
Biaya perolehan:				
Kantin	-	535.680.000,00	-	535.680.000,00
Guest House	-	352.140.000,00	-	352.140.000,00
<i>Jumlah biaya perolehan</i>	-	887.820.000,00	-	887.820.000,00
Akumulasi penyusutan	-	100.388.400,00		100.388.400,00
<i>Jumlah Properti Investasi</i>	-			787.431.600,00

Rincian pada lampiran 5

4.3.8 Utang Usaha

Terdiri atas:

	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Farmasi	350.189.303,00	-	350.189.303,00	
BHP dan Perbekalan	67.602.766,94	-	67.602.766,94	
Reagensia	67.712.885,50	2.342.144,40	65.370.741,10	2.791,06
Pengangkutan Sampah Domestik ke TPS	1.990.000,00	-	1.990.000,00	
<i>Jumlah</i>	487.494.955,44	2.342.144,40	485.152.811,04	20.714,04

Rincian pada lampiran 6

4.3.9 Beban Yang Masih Harus Dibayar

Terdiri atas:

	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Jasa Pelayanan - BPJS	3.095.065.669,40	-	3.095.065.669,40	
Listrik	105.600.300,00	89.826.900,00	15.773.400,00	17,56
Telpon	1.138.185,00	1.132.726,00	5.459,00	0,48
Air	43.985.338,00	34.866.636,00	9.118.702,00	26,15
Internet	7.921.250,00	8.038.750,00	(117.500,00)	(1,46)
Pengiriman	177.300,00	-	177.300,00	-
<i>Jumlah</i>	3.253.888.042,40	133.865.012,00	3.120.023.030,40	2.330,72

4.3.10 Pendapatan Diterima di Muka

Terdiri atas:

	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Sewa ATM Bank Kaltimtar	1.458.333,33	-	1.458.333,33	

Penjelasan:

Berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 119/52/RSUD/AHM-TU/2023 Tanggal 22 November 2023 Tentang Sewa Menyewa Ruang ATM di RSJD Atma Husada Mahakam. Jangka waktu sewa mulai tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan 7 Februari 2024 dengan harga sewa Rp35.000.000,- selama 2 tahun. Dibayar penuh sebesar Rp35.000.000,- pada tanggal 21 Desember 2023.

RUMAH SAKIT Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
Provinsi Kalimantan Timur

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal
31 Desember 2022 dan 2023

4.3.11 Ekuitas

Terdiri atas:

	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Ekuitas awal	110.118.186.834,54	114.445.539.099,40	(4.327.352.264,86)	(3,78)
Saldo surplus (defisit)	(1.488.641.653,81)	(4.952.150.284,09)	3.463.508.630,28	(69,94)
Dikonsolidasikan				
(Pendapatan APBD)	-	-	-	
Dampak kumulatif				
perubahan kebijakan				
kesalahan mendasar	-	-	-	
Koreksi ekuitas	-	624.798.019,23	(624.798.019,23)	(100,00)
Gedung dan bangunan	352.140.000,00	-	-	
Piutang layanan	(1.827.233,26)	-	(1.827.233,26)	
Aset rusak berat/usang	(859.868.000,00)	-	(859.868.000,00)	
Aset tetap yang tidak digunakan	(59.950.000,00)	-	(59.950.000,00)	
Beban yang masih harus				
dibayar - bahan kimia	0,40	-	0,40	
Ekuitas akhir	108.060.039.947,87	110.118.186.834,54	(2.058.146.886,67)	(1,87)

4.4 Laporan Operasional

4.4.1 Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat

Terdiri atas:

	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Pasien BPJS	23.922.789.816,20	633.390.289,88	23.289.399.526,32	3.676,94
Pasien Umum	4.309.277.633,00	25.250.452.618,98	(20.941.174.985,98)	(82,93)
Jumlah	28.232.067.449,20	25.883.842.908,86	2.348.224.540,34	9,07

4.4.2 Pendapatan APBD

Terdiri atas:

	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Subsidi belanja pegawai	34.198.257.791,00	28.836.699.578,00	5.361.558.213,00	18,59
Subsidi belanja barang dan jasa	17.015.635.059,00	14.522.478.519,46	2.493.156.539,54	17,17
Subsidi belanja modal	13.172.341.179,00	18.321.840.160,00	(5.149.498.981,00)	(28,11)
Jumlah	64.386.234.029,00	61.681.018.257,46	2.705.215.771,54	4,39

4.4.3 Pendapatan Usaha Lainnya

Terdiri atas:

	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Bunga jasa giro	39.384.066,060	-	39.384.066,060	
Kelebihan pembayaran BPJS	89.528,000	-	89.528,000	
Studi banding	1.500.000,000	-	1.500.000,000	
Pendidikan dan pelatihan	194.830.000,000	-	194.830.000,000	
Sewa ATM	33.541.666,667	-	33.541.666,667	
Guest house	22.600.000,000	-	22.600.000,000	
Sewa ruko/kantin	34.400.000,000	-	34.400.000,000	
Penitipan anak	28.300.000,000	-	28.300.000,000	
Sewa koperasi	1.350.000,000	-	1.350.000,000	
Sewa parkir	721.450,000	-	721.450,000	
Air ruko/kantin	2.300.000,000	-	2.300.000,000	
Laundry	19.140.000,000	-	19.140.000,000	
Ambulan	500.000,000	-	500.000,000	
Fee Hantaru	300.000,000	-	300.000,000	
Lain-lain	341.000.010,000	-	341.000.010,000	
Jumlah	719.956.720,727	1.454.991.637,020	(735.034.916,293)	(50,52)

RUMAH SAKIT Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
Provinsi Kalimantan Timur

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal
31 Desember 2022 dan 2023

4.4.4 Beban Pegawai

Terdiri atas:

	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Gaji dan tunjangan ASN	13.100.323.791,00	10.944.199.447,00	2.156.124.344,00	19,70
Tambahan penghasilan ASN	20.918.034.000,00	17.743.100.131,00	3.174.933.869,00	17,89
Honorarium	179.900.000,00	149.400.000,00	30.500.000,00	20,41
Pegawai BLUD	17.161.163.588,40	21.815.463.828,88	(4.654.300.240,48)	(21,33)
Jumlah	51.359.421.379,40	50.652.163.406,88	707.257.972,52	1,40

4.4.5 Beban Persediaan

Terdiri atas:

	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Obat-obatan	2.764.873.855,70	2.205.247.149,00	559.626.706,70	25,38
Bahan kimia	678.704.295,50	678.063.362,40	640.933,10	0,09
Alat kedokteran	220.844.990,94	87.545.930,00	133.299.060,94	152,26
Makan dan minum pasien	1.801.054.225,00	2.034.668.850,00	(233.614.625,00)	(11,48)
Alat tulis kantor, kertas dan cetakan	292.525.062,00	338.183.252,73	(45.658.190,73)	(13,50)
Benda-benda pos	15.280.000,00	14.800.000,00	480.000,00	3,24
Bahan kompter	135.104.974,00	176.965.370,00	(41.860.396,00)	(23,65)
Perabot kantor	740.021.748,00	100.131.656,00	639.890.092,00	639,05
Alat-alat listrik	182.271.915,00	149.014.500,00	33.257.415,00	22,32
Perlengkapan dinas	112.074.480,00	-	112.074.480,00	
Cinderamata	105.960.000,00	-	105.960.000,00	
Kantor lainnya	60.473.318,00	711.166.121,22	(650.692.803,22)	(91,50)
Pakaian olah raga	44.550.000,00	-	44.550.000,00	
Bahan bangunan	158.710.648,00	392.078.320,00	(233.367.672,00)	(59,52)
Bahan bakar dan pelumas	414.252.500,00	365.491.800,00	48.760.700,00	13,34
Isi tabung pemadam kebakaran	25.150.000,00	27.150.000,00	(2.000.000,00)	(7,37)
Isi tabung gas	228.525.000,00	220.455.245,00	8.069.755,00	3,66
Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat	-	109.987.680,00	(109.987.680,00)	(100,00)
Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	363.100.000,00	(363.100.000,00)	(100,00)
Pakaian KORPRI	-	116.900.000,00	(116.900.000,00)	(100,00)
Bahan lainnya	68.675.396,00	90.429.600,00	(21.754.204,00)	(24,06)
Jumlah	8.049.052.408,14	8.181.378.836,35	(132.326.428,21)	(1,62)

4.4.6 Beban Jasa

Terdiri atas:

	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Jasa pelayanan	12.399.997.106,35	10.534.494.323,99	1.865.502.782,36	17,71
Honorarium narasumber	30.794.800,00	-	30.794.800,00	
Jasa pemasangan instalasi	226.547.000,00	-	226.547.000,00	
Jasa kontribusi asosiasi	295.878.500,00	585.894.000,00	(290.015.500,00)	(49,50)
Iklan dan reklame	110.343.375,00	127.312.700,00	(16.969.325,00)	(13,33)
Paket dan pengiriman	2.242.000,00	2.386.200,00	(144.200,00)	(6,04)
Penambahan daya	72.065.000,00	-	72.065.000,00	
Medical check up	39.421.750,00	26.036.760,00	13.384.990,00	51,41
Iuran jaminan kesehatan non ASN	403.364.685,00	451.087.602,00	(47.722.917,00)	(10,58)
Iuran jaminan kecelakaan non ASN	682.484.520,00	558.049.440,00	124.435.080,00	22,30
Sewa gedung dan bangunan	157.846.333,00	420.337.221,00	(262.490.888,00)	(62,45)
Jasa konsultasi konstruksi	861.656.592,00	694.296.000,00	167.360.592,00	24,11
Jasa konsultasi non konstruksi	-	62.000.000,00	(62.000.000,00)	(100,00)
Jasa kalibrasi	140.179.269,00	-	140.179.269,00	
Bimbingan teknis	233.263.337,00	111.476.316,00	121.787.021,00	109,25
Penghargaan atas suatu prestasi	27.000.000,00	-	27.000.000,00	

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
POVINSI KALIMANTAN TIMUR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal
31 Desember 2022 dan 2023

<i>Jumlah</i>	15.683.084.267,35	13.573.370.562,99	2.109.713.704,36	15,54
4.4.7 Beban Pemeliharaan				
Terdiri atas:				
	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Peralatan dan Mesin	552.140.317,00	1.106.154.025,00	(554.013.708,00)	(50,08)
Gedung dan bangunan	833.260.295,00	9.558.510.071,46	(8.725.249.776,46)	(91,28)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	251.634.810,00	502.289.024,00	(250.654.214,00)	(49,90)
<i>Jumlah</i>	1.637.035.422,00	11.166.953.120,46	(9.529.917.698,46)	(85,34)
4.4.8 Beban Langganan Daya dan Jasa				
Terdiri atas:				
	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Listrik	1.075.131.260,00	1.047.260.800,00	27.870.460,00	2,66
Telepon	419.355.984,00	11.555.525,00	407.800.459,00	3.529,05
Air	12.884.853,00	361.616.537,00	(348.731.684,00)	(96,44)
Langganan surat kabar/majala	183.516.250,00	207.671.950,00	(24.155.700,00)	(11,63)
Kawat/Faksimili/Internet/TV	99.964.475,00	104.288.587,00	(4.324.112,00)	(4,15)
<i>Jumlah</i>	1.790.852.822,00	1.732.393.399,00	58.459.423,00	3,37
4.4.9 Beban Perjalanan Dinas				
Terdiri atas:				
	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Perjalanan dinas dalam daerah	2.157.032.135,00	1.644.456.814,00	512.575.321,00	31,17
4.4.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi				
Terdiri atas:				
	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Peralatan dan mesin	12.873.037.552,60	5.965.189.844,00	6.907.847.708,60	115,80
Gedung dan bangunan	938.648.333,00	920.518.553,00	18.129.780,00	1,97
Jalan, irigasi, dan jaringan	137.712.443,00	62.325.143,00	75.387.300,00	120,96
Software	23.145.000,00	22.745.000,00	400.000,00	1,76
Properti investasi	88.782.000,00	-	88.782.000,00	
<i>Jumlah</i>	14.061.325.328,60	6.970.778.540,00	7.090.546.788,60	101,72
4.4.11 Beban Penyisihan Piutang				
Terdiri atas:				
	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Penyisihan piutang	89.096.090,25	(111.991.592,25)	201.087.682,50	(180)
4.4.12 Kegiatan Non Operasional				
Terdiri atas:				
	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Defisit kegiatan non operasi	-	(162.500.000,00)	162.500.000,00	(100,00)

RUMAH SAKIT Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
Provinsi Kalimantan Timur

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal
31 Desember 2022 dan 2023

4.5 Laporan Arus Kas

4.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Terdiri atas:

	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Arus masuk kas	91.651.745.817,20	90.125.111.782,32	1.526.634.034,88	1,69
Pendapatan jasa layanan dari masyarakat				
Pendapatan jaminan				
Pasiens BPJS	21.687.506.356,00			
Pasiens IPWL	478.157,00			
Dinas Kesehatan	410.629.764,14			
Dinas Sosial	136.204.824,00			
Jumlah	22.234.819.101,14			
Pendapatan non jaminan				
Pasiens umum rawat inap	379.547.494,00			
Pasiens umum rawat jalan	3.149.776.337,00			
Pasiens PKL Wing's	779.953.802,00			
Jumlah	4.309.277.633,00			
Jumlah pendapatan jasa layanan	26.544.096.734,14	27.810.703.234,98	(1.266.606.500,84)	(4,55)
Pendapatan APBD				
Alokasi belanja pegawai	34.198.257.791,00			
Alokasi belanja barang dan jasa	17.015.635.059,00			
Alokasi belanja modal	13.172.341.179,00			
Jumlah pendapatan APBD	64.386.234.029,00	61.681.018.257,46	2.705.215.771,54	4,39
Pendapatan usaha lainnya				
Kelebihan pembayaran BPJS	89.528,00			
Studi banding	1.500.000,00			
Pendidikan dan pelatihan	194.830.000,00			
Sewa ATM	35.000.000,00			
Guest house	22.600.000,00			
Sewa ruko/kantin	34.400.000,00			
Penitipan anak	28.300.000,00			
Sewa koperasi	1.350.000,00			
Sewa parkir	721.450,00			
Air ruko/kantin	2.300.000,00			
Laundry	19.140.000,00			
Ambulan	500.000,00			
Fee Hantaru	300.000,00			
Lain-lain	341.000.010,00			
Bunga jasa giro	39.384.066,06			
Jumlah pendapatan usaha lainnya	721.415.054,06	633.390.289,88	88.024.764,18	13,90
Jumlah arus masuk kas	91.651.745.817,20	90.125.111.782,32	1.526.634.034,88	1,69
Arus keluar kas	76.669.535.305,35	87.217.738.912,33	(10.548.203.606,98)	(12,09)
Belanja pegawai				
Gaji dan tunjangan ASN	13.100.323.791,00	10.944.199.447,00	2.156.124.344,00	19,70
Tambahkan penghasilan	20.918.034.000,00	17.743.100.131,00	3.174.933.869,00	17,89
Honorarium	179.900.000,00	149.400.000,00	30.500.000,00	20,41
Pegawai BLUD	14.066.097.919,00	21.815.463.828,88	(7.749.365.909,88)	(35,52)
Jumlah belanja pegawai	48.264.355.710,00	50.652.163.406,88	50.652.163.406,88	100,00

RUMAH SAKIT Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
Provinsi Kalimantan Timur

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal
31 Desember 2022 dan 2023

Belanja barang dan jasa				
Bahan konstruksi dan bangunan	26.991.648,00		26.991.648,00	
Bahan kimia	1.920.000,00	1.268.619,00	651.381,00	51,35
Bahan bakar minyak dan pelumas	313.198.500,00	76.835.800,00	236.362.700,00	307,62
Isi tabung pemadam kebakaran	25.150.000,00	27.150.000,00	(2.000.000,00)	(7,37)
Isi tabung gas	203.981.500,00	220.455.245,00	(16.473.745,00)	(7,47)
Bahan-bahan lainnya	51.506.531,00		51.506.531,00	
Suku cadang	24.879.300,00		24.879.300,00	
Alat tulis kantor	161.837.064,00	185.312.980,00	(23.475.916,00)	(12,67)
Kertas dan cover	131.435.929,00		131.435.929,00	
Bahan komputer	17.996.874,00		17.996.874,00	
Perabot kantor	152.967.400,00	113.837.311,00	39.130.089,00	34,37
Alat listrik	96.971.431,00		96.971.431,00	
Perlengkapan dinas	2.902.650,00		2.902.650,00	
Souvenir	130.360.000,00		130.360.000,00	
Kegiatan kantor lainnya	59.502.436,00	147.990.517,00	(88.488.081,00)	(59,79)
Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat	-	109.987.680,00	(109.987.680,00)	(100,00)
Pakaian dinas harian	-	363.100.000,00	(363.100.000,00)	(100,00)
Pakaian KORPRI	-	116.900.000,00	(116.900.000,00)	(100,00)
Obat-obatan lainnya	7.992.000,00	-	7.992.000,00	
Pakaian olah raga	44.550.000,00	-	44.550.000,00	
Komponen peralatan dan I	1.745.500,00	-	1.745.500,00	
Jasa tenaga administrasi	11.901.000.000,00	9.616.550.000,00	2.284.450.000,00	23,76
Jasa kontribusi asosiasi	22.338.000,00	-	22.338.000,00	
Jasa kalibrasi	140.179.269,00	-	140.179.269,00	
Telpon	12.879.394,00	14.046.789,00	(1.167.395,00)	(8,31)
Air	410.237.282,00	346.868.349,00	63.368.933,00	18,27
Listrik	1.059.357.860,00	1.027.994.500,00	31.363.360,00	3,05
Internet	100.081.975,00	99.533.337,00	548.638,00	0,55
Iuran jaminan kesehatan r	403.364.685,00	360.717.213,00	42.647.472,00	11,82
Iuran jaminan kecelakaan r	682.484.520,00	558.049.440,00	124.435.080,00	22,30
Bimbingan teknis	56.317.997,00	6.800.000,00	49.517.997,00	728,21
Pemeliharaan peralatan dan mesin	-	24.233.028,00	(24.233.028,00)	(100,00)
Pemeliharaan gedung dan bangunan	-	1.024.497.661,46	(1.024.497.661,46)	(100,00)
Perjalanan dinas biasa	752.005.314,00	80.350.050,00	671.655.264,00	835,91
Penghargaan atas suatu prestasi	19.500.000,00	-	19.500.000,00	
Barang dan jasa BLUD	11.389.544.536,35	22.043.096.985,99	(10.653.552.449,64)	(48,33)
Jumlah belanja barang dan jasa	28.405.179.595,35	36.565.575.505,45	36.565.575.505,45	100,00
Jumlah arus keluar kas	76.669.535.305,35	87.217.738.912,33	(10.548.203.606,98)	(12,09)
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	14.982.210.511,85	2.907.372.869,99	12.074.837.641,86	415,32

RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
POVINSI KALIMANTAN TIMUR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal
31 Desember 2022 dan 2023

4.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Terdiri atas:

	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Arus masuk kas	-	-	-	
Arus keluar kas	-	-	-	
Perolehan peralatan dan mesin	12.010.593.519,00	20.584.096.876,00	(8.573.503.357,00)	(41,65)
Perolehan gedung dan bangunan	1.799.974.700,00	1.417.300.000,00	382.674.700,00	27,00
Jumlah arus keluar kas	13.810.568.219,00	22.001.396.876,00	(8.190.828.657,00)	(37,23)
<i>Arus kas bersih dari aktivitas investasi</i>	(13.810.568.219,00)	(22.001.396.876,00)	8.190.828.657,00	(37,23)

4.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Terdiri atas:

	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Ekuitas awal	110.118.186.834,54	114.445.539.099,40	(4.327.352.264,86)	(3,78)
Surplus/defisit-LO	(1.488.641.653,81)	(4.952.150.284,09)	3.463.508.630,28	(69,94)
Dampak kumulatif perubahan kebijakan kesalahan mendasar	-	-	-	
Koreksi ekuitas	(569.505.232,86)	624.798.019,23	(1.194.303.252,09)	(191,15)
Gedung dan bangunan	352.140.000,00	-	352.140.000,00	
Koreksi piutang layanan	(1.827.233,26)	-	(1.827.233,26)	
Aset rusak berat/usang	(859.868.000,00)	-	(859.868.000,00)	
Aset tetap yang tidak digunakan	(59.950.000,00)	-	(59.950.000,00)	
Utang belanja barang pakai habis - Bahan-bahan kimia	0,40	-	0,40	
Ekuitas akhir	108.060.039.947,87	110.118.186.834,54	(2.058.146.886,67)	(1,87)

VII. Penutup

Direktur RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab yang berisikan pernyataan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kebenaran isi laporan keuangan.

Pejabat pengelola RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab terhadap penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 27 Februari 2024.

Demikian laporan Keuangan RSJD) Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur Berbasis AkruaI Tahun Anggaran 2023 ini kami susun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh pihak yang berkepentingan.